

INTISARI

Krisis Ekonomi di Asia dan korupsi yang terjadi sebagai bagian dari akar permasalahan dan isu-isu perdebatan tentang penerapan governansi pada badan ataupun perusahaan. Akar permasalahan dan isu-isu perdebatan yang terjadi menggambarkan kualitas penerapan governansi yang masih rendah. Hal ini akan membawa dampak negatif pada kepercayaan masyarakat hingga investor. Komitmen manajemen Badan ataupun perusahaan dalam menerapkan governansi harus terencana dan berkelanjutan menjadi modal utama memperbaiki kualitas penerapan Governansi. Kualitas penerapan governansi perlu diukur atau dinilai untuk mengetahui kesesuaian antara aturan yang ada dengan pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai atau mengukur kualitas penerapan governansi di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan model pemeringkatan *Center for Good Corporate Governance* UGM (CGCG UGM). Periode penelitian adalah tahun 2014 (satu tahun). Model Pemeringkatan CGCG UGM berlandaskan pada prinsip transparansi (*transparency*), pertanggungjelasan (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Penelitian ini melibatkan responden governansi yang meliputi Perwakilan Direksi (Pejabat Eselon I), Komite-komite, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*). Hasil penilaian atau pengukuran dalam penelitian ini akan dibandingkan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Mitra Bhadra.

Hasil penilaian penerapan governansi di BPJS Ketenagakerjaan tahun 2014 dari Mitra Bhadra “sangat baik” atau dengan skor 95,26 namun berdasarkan model pemeringkatan CGCG UGM belum optimal yaitu “A++” atau memiliki total nilai 2675, dari nilai maksimal 2960 atau 90,4% dan berada di posisi ranking 2 dari 16 rangking.

Kata kunci: Governansi, Pemeringkatan CGCG UGM, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Hukum Publik.

ABSTRACT

The corruption and economic crisis in Asia as a part of the roots problems and debate on the issues of the governance practice in the agencies or the company. This illustrates the quality of the governance practice is low. It will have a negative impact on public confidence to investors. Agencies or company management commitment in implementing corporate governance must have planned and sustainable into the main capital improve the quality of the governance practice. A Quality of the governance practice needed to be measured or assessed to determine compatibility between existing rules with implementation.

This research aims to assess or measure the quality of governance in the implementation of the Social Security Administering Body for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) based on the Center for Good Corporate Governance of Gadjah Mada University (CGCG UGM). Period of this research was on 2014 (one year). Rating model of CGCG UGM based on the principle of transparency, accountability, responsibility, and fairness. The research involved governance respondents which includes representatives of Directors (Echelon I), the Committees, and Stakeholders. Results of assessment or measurement in this research will be compared with the results of assessments conducted by Mitra Bhadra.

Results of assessment of the implementation of governance in BPJS Ketenagakerjaan on 2014 from Mitra Bhadra is "very good" or with a total score of 95.26, but according to CGCG UGM rating models it has not been optimal as "A ++" grade or which has a total score of 2675, out of a maximum score of 2960 or 90.4%, and ranks 2nd out of 16 rankings.

Keyword: Corporate Governance, CGCG UGM ratings model, BPJS Ketenagakerjaan, Public Law Agency.